

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keinginan dan tuntutan masyarakat yang semakin banyak terhadap proses pemerintah yang dapat terlaksana dengan baik (*good governance government*), telah membuat pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk membuat dan menerapkan akuntabilitas publik. Secara umum akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut Mardiasmo (2009).

Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah berlangsung di Indonesia dalam tahap yang cukup lama. Otonomi daerah memiliki tujuan utama yaitu harapan untuk terjadinya peningkatan atas kesejahteraan umum, pelayanan umum, serta kapasitas antar daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pekerjaan daerahnya. Maka dari itu adanya tuntutan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah sangat meningkat. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Instansi-instansi pemerintah telah di haruskan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan otonomi daerah diatas, maka akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai salah satu media pertanggung jawaban dari pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola otonomi daerah nya. Akuntabilitas oleh pemerintah daerah dapat ditinjau dengan menyajikan setiap informasi dengan membuat laporan kinerja yang dihasilkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP memberikan hasil akhir berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kewajiban untuk melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ini dilakukan kepada seluruh instansi pemerintah daerah. AKIP akan di evaluasi oleh Kemenpan RB yang hasil akhirnya akan diberikan pemeringkatan (*rating*) dari hasil evaluasi. Pemeringkatan hasil evaluasi tersebut terdiri dari AA (Sangat Memuaskan), A (Memuaskan), BB (Sangat Baik), B (Baik), CC (cukup), C (Kurang), D (Sangat Kurang). Tujuan implementasi AKIP menurut Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 meliputi empat hal. Pertama, memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP. Kedua, menilai tingkat implementasi SAKIP. Ketiga, memberikan saran perbaikan

untuk peningkatan implementasi SAKIP. Keempat, memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatannya. Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan tenaga kerja. Menurut undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. setiap sumber daya manusia dengan kualitas yang baik, cenderung akan memiliki pemahaman yang baik pula sehingga mampu untuk menghasilkan pekerjaan yang optimal. Fungsi-fungsi organisasi harus diisi dengan sumber daya manusia dengan memiliki kompetensi yang tepat agar pekerjaan yang dilakukan dapat untuk dipertanggung jawabkan dengan baik. Adanya kompetensi sumber daya manusia mampu meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern dijelaskan sebagai:

“Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik dan benar pada pemerintahan daerah dapat mampu untuk membantu terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Faktor terakhir yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah *good governance*. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka pemerintah mencoba untuk membuat pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang disebut dengan *good governance*. Menurut Mardiasmo (2009), *good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Berdasarkan PP No. 101 tahun 2000 menyatakan *Good governance* adalah

“Pemerintah mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.”

Ketika terlaksananya *good governance* sesuai dengan pengertian di atas maka perintah dapat terlaksana dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menciptakan kegiatan kerja yang berlangsung secara profesional dengan prinsip efektif, efisien, bertanggung jawab dan ekonomis sesuai dengan peraturan maka akan terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun, di setiap penelitian memberikan kesimpulan dan hasil yang berbeda-beda.

Penelitian Claraini (2017) menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah SKPD Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian Sutirah (2018) menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa dan penerapan SPIP berpengaruh negatif pada kinerja pemerintah desa aparatur pemerintah desa Kabupaten Bantul. Penelitian Gunawan A dan Nasir A (2019) menunjukkan bahwa *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian Nadiyah (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin OPD

Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian Nadila (2020) menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, Good Governance, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah aparatur sipil negara Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Tambuk (2020) menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan kinerja, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah OPD Kabupaten Manggarai Timur.

Hasil uji dan kesimpulan dari penelitian terdahulu yang berbeda-beda memotivasi peneliti untuk melakukan pengujian kembali terhadap variabel yang digunakan di penelitian terdahulu dengan menggunakan subjek penelitian yang berbeda, yaitu Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Alasan peneliti memilih Kabupaten Gunungkidul sebagai subjek penelitian karena pada tahun 2021 penilaian SAKIP Gunungkidul mendapatkan penilaian terendah pada penilaian kabupaten di provinsi Yogyakarta dan mengalami penurunan penilaian dari 2020 yang mendapatkan nilai “BB” menjadi menurun pada 2021 menjadi “B”. (<https://jogjaprov.go.id/berita/detail/9325-terbaiknasional-sakip-diy-kembali-raih-predikat-aa>). Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sudah meraih Predikat “B”, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum terlaksana secara maksimal di OPD Gunungkidul dan diperlukan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Gunungkidul yang tentunya akan meningkatkan kinerja

pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul

“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Gunung Kidul”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
3. Apakah penerapan *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan motivasi yang telah ditulis, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali variabel dari penelitian terdahulu, yaitu pengaruh sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan *good governance* terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan objek yang berbeda yaitu OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan *good governance* terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi akademisi dalam memberikan tambahan pengetahuan, wawasan serta dapat dengan baik untuk dipergunakan sebagai referensi terbaru untuk penelitian yang sejenis

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk mengevaluasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.